

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 Tahun 2015 antara lain menetapkan pengaturan mengenai Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau sebagai perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. SAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, dalam persepektif yang lebih luas maka lakip berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang didalamnya berisi perencanaan stratejik dan implementasinya serta tolak ukur Keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Berau. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahunan

Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah, menggunakan asas Otonomi dan tugas pembantuan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah dan dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efesein, efektif, transparan, akuntabel tertib dan adil yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Selanjutnya dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparan dan akuntabilitas anggaran, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan.
2. Disiplin anggaran, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan azas efesensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kesamaan anggaran, pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efesensi dan efektifitas anggaran,
5. Disusun dengan pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil atas alokasi biaya atau masukan (input) yang ditetapkan.

Prinsip anggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau termasuk BPKAD Kabupaten Berau sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten berau yang telah ditetapkan , perlu disusun laporan system akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelolaan dan Aset Daerah berdasarkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2020.

1.2. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdaarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan organisasi lembaga teknis daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau sebelumnya digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dengan nomenklatur SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan. Namun sejak tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana dasar pembnetukan SKPD tersebut diatas, maka dipecah dua yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsure pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah , yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Penyusunan LKJ-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten berau.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 (Lima) Tahun
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja
 - 3) Sub Bidang Analisis Kebutuhan
4. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

- 2) Sub Bidang Belanja Langsung
- 3) Sub Bidang Kas Daerah
5. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja
 - 3) Sub Bidang Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan
6. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan
 - 3) Sub Bidang Pengadaan dan Pengamanan
7. UPTB
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun secara detil Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

1.4 SUMBER DAYA SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau memiliki sumberdaya manusia sejumlah 76 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Struktural : 21 Orang
- b) Staf/PNS : 41 Orang
- c) Honorer : 14 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan :

- a. S 2 : 10 Orang
- b. S 1 : 23 Orang
- c. D 3 : 4 Orang
- d. SLTA : 24 Orang
- e. SD : 1 Orang
- f. Honor : 14 Orang

2. Jenis Kepegawaian :

Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 62 dan Pegawai Honor Daerah 14 Orang

3. Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin terdiri dari 35 Orang Laki-laki dan 27 Orang Perempuan

4. Pangkat / Golongan :

Pangkat / Golongan terdiri dari 1 orang pada golongan IV/c , selanjutnya 1 Orang pada golongan IV/b, 2 Orang Golongan IV/a 13 Orang golongan III/d, 7 orang golongan III/c 10 orang, golongan III/b 10 orang, golongan III/a, 2 Orang, golongan II/d, 15 orang golongan II/c, dan 1 orang golongan 1/b

1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah merupakan SKPD yang dibentuk sebagai salah satu leading sector Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut ada beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

- 1. Belum terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkualitas dan Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya berkaitan dengan Aset daerah merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh BPKAD saja tetapi terjadi disemua SKPD yang ada di kabupaten berau. jika kemudian diuraikan lebih jauh maka kondisi ini dikarenakan oleh :

- a. Rendahnya kapasitas pengelolaan dilingkungan pemerintah daerah hal ini tentunya akan sangat menghambat proses pengelolaan keuangan dan asset daerah di masing masing SKPD
 - b. Rendahnya Koordinasi dan prosedur perencanaan dan pengagaran. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selalu dilihat dari laporan keuangan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan bulanan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun sampai dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang menjadi bahan audit BPK setiap tahun. Oleh karena pentingnya laporan keuangan tersebut maka koordinasi dan ketepatan waktu pengumpulan laporan dari masing masing SKPD menjadi hal pokok yang tidak boleh terlewatkan setiap bulannya. Namun demikian pada kenyataannya inilah masalah yang sering dihadapi oleh BPKAD
 - c. Belum optimalnya pemetaan dan perumusan kebijakan tentang pemanfaatan asset potensial daerah, acuan alokasi belanja barang yang akan menjadi asset atau barang milik daerah khususnya dilingkup masing masing SKPD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang unit (RKBU) yang harus disusun setiap tahunnya, sebelum proses pembahasan KUA-PPAS sehingga penetapan alokasi pagu untuk belanja modal khususnya di internal SKPD benar benar dilandasi oleh analisa rencana kebutuhan barang di masing-masing SKPD.
2. Minimnya pengagaran It dalam Pengelolaan asset daerah
- Penguatan penggunaan Sumber daya manusia pengurus dan penyimpan barang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam lima tahun kedepan .SDM yang ada masih banyak yang belum menguasai aplikasi SIMDA BMD dan ada beberapa laporan yang harus dibuat secara manual sebagai lembar kerja di masing masing SKPD sehingga perlu sekali penguatan SDM di bidang penatausahaan asset atau barang milik daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 74 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun , yaitu untuk 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau mungkin timbul sebagai pelaksanaan tugas dibidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Tahun 2016-2021 menetapkan perencanaan strategis untuk priode 5 (Lima) tahun yang merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat dalam Tabel Sasaran Target dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan asset daerah yang optimal	Meningkatkan kapasitas manajemen, daya dukung aparatur, dan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah berbasis data dan Teknologi Informasi	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten berau perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan mengupayakan perubahan kearah perbaikan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sejalan dengan visi pemerintah kabupaten berau mengadopsi visi dari RPJMD Kabupaten Berau sebagai berikut :

Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Makna dari visi tersebut adalah sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten berau dan seluruh stekholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan kabupaten berau secara komprehensif.

Misi adalah rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi perangkat daerah. Rumusan misi perangkat daerah yang baik menggambarkan visi perangkat daerah yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perangkat daerah bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2.1.2. Kebijakan, Strategis, arah kebijakan dan program

Strategis dan kebijakan dalam renstra organisasi perangkat daerah dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD, selanjut menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program Prioritas RPJMD.

Strategis dan Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD. Mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategis juga dapat digunakan sebagaimana sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja. Perencanaan strategis tidak saja mengandalkan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategis yang dipilih.

Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah bersangkutan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, program yang akan dijalankan oleh BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten /kota
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Program pelayanan administrasi perkantoran

Adapun indikator atau alat ukur keberhasilan daerah sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini Bpk terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	Hasil evaluasi dari BPK	Audit dari BPK	BPKAD
2	Meningkatkan tata kelola barang/milik daerah yang berkualitas	Presentase Aset yang terinventarissasi		100 %	BPKAD	BPKAD
3	Penyusunan Perda dan Perbup	Penetapan APBD		100 %	100%	BPKAD
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai/LKJ-IP kategorie	Predikat	Hasil evaluasi dari Inspektorat Kab.Berau	BPKAD	BPKAD

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 beserta indikator dan target tahunan dapat dilihat pada table berikut :

Misi ke-4 RPJMD : Menciptakan Tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang optimal	Meningkatnya kapasitas manajemen, daya dukung aparatur dan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah berbasis data dan teknologi informasi	Opini Badan Pemerik Keuangan (BPK)

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Restra SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah menetapkan indikator kinerja utama yaitu

Target Indikator Kinerja Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, sehingga terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sepakat untuk melaksanakan kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan sumber daya yang tersedia

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan saja, akan tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 2016-2022, target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 disusun dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau tahun 2018 yang dituangkan dalam table dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
2	Meningkatnya Tata kelola barang milik daerah yang berkualitas	Presentase asset yang terintegrasi	100 %
3	Menyusun Perda dan perbup	Penetapan APBD	Tepat waktu
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai / LKj-IP kategori	77,22 (BB)

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Utama

- Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Penunjang

- Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Berau Nomor 700/119/Itkab-Adm/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.

Adapun Hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Berau

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Indikator Kinerja Utama telah ada dan untuk menggambarkan alasan terbentuknya satuan kerja, maka diwujudkan sasaran Strategis yang ditetapkan	Reviu Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah ada dan semuanya dapat diukur.
2.	Pedoman SOP tentang pengumpulan data kinerja - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid - Adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan - Terdapat penanggungjawab yang jelas - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	Selama ini kami hanya mengumpulkan data lewat bidang – bidang dan langsung meminta dengan kasubid-kasubid yang terkait dan masalah SOP kami belum membuat
3.	Data laporan kinerja telah berorientasi pada Outcome yang menyajikan evaluasi, analisis mengenai capaian kinerja yang penting.	Kegiatan-kegiatan yang ada di Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah telah terealisasi dengan baik dan setiap program dan kegiatan dalam penyajian laporan kinerja memenuhi capaian.
4.	Pelaksanaan Rencana Aksi yang telah dievaluasi harus disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Laporan Rencana Aksi sudah dilaksanakan tapi hanya tahunan saja untuk bulanan dan semesteran belum dibuat

3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Berau dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Bupati Berau dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintah daerah dibidang pelaksanaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah, telah melaksanakan beberapa capaian kinerja dengan indicator kinerja utama sebagai alat ukurnya dengan hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian %	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian %
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Presentase asset yang terintegrasi	peringkat	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
3.	Penyusunan Perda dan Perbup	Perda/ Perbup	100	100	100	100	100	100 %
4.	Nilai laporan Akuntabilitas kinerja	Peringkat	B	B	69,29	B	BB	77,22

Dari uraian tabel diatas, tergambar bahwa dari 4 indikator kinerja utama 2 telah memenuhi capaian kinerja 100 % untuk memperjelas informasi mengenai berbagai capaian yang telah dilakukan akan dijelaskan dalam analisis capaian kinerja dan keterkaitan antara sasaran strategis 1 – 4 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas :

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah telah melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Penjasnjian Kinerja yang telah disepakati anatar Bupati Berau dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah Kabupaten Berau, adapaun seluruh capaian kinerja berdasarkan IKU sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis BPKAD dapat dikelompokan dan dianalisa sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Opini BPK Terhadap laporan Keuangan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian	Target 2017	Realisasi 2017	capaian %
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Prerdikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan fungsi yang dipercayakan kepada BPKAD atas penggunaan anggaran, hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah ; Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai analisis terhadap kinerja.

Laporan Kinerja disusun dengan memuat informasi tentang :

1. Uraina singkat organisasi
2. Rencana Strategis yang telah ditetapkan
3. Pengukuran Kinerja
4. Evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan.laporan kinerja disampaikan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Salah satu faktor utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja guna menjamin peningkatan dalam pelayanan publik,

pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan yang diharapkan.

Evaluasi Akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap sistem akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Berau berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (Lima) komponen manajemen kinerja yaitu :

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Pencapaian Sasaran / kinerja Organisasi

Sasaran terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel, transparan menuju good governance untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah perprinsip pada azas keterbukaan, akuntabel, efektif dan efesien dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta kebersihan dan keterpaduan tugas fungsi penyelenggara pemerintah dan pembangunan.

3.3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian KInerja	Tahun 2018		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Tahun 2017	Target	Realisasi	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam penyusunan	WTP
2	Presentase asset yang terintegrasi	Peringkat	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
3	Penyusunan Perda dan Perbup	Perda/Perbup	100 %	100 %	100 %	100 %`	100 %	100 %
4	Nilai laporan akuntabilitas kinerja	Peringkat	B	BB	77,22	B	-	-

3.3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Opini Badan Pengelolaan Keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	Masih dalam penyusunan

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD	Realisasi 2018	Tingkat Pencapaian
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP	Masih dalam proses	WTP

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	Masih dalam proses	WTP	WTP

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan

- Kesesuaian antara target dengan realisasi baik dari sisi keuangan maupun output kegiatan OPD
- Penatausahaan keuangan OPD dilakukan secara tertib, benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sarana dan prasarana pendukung kerja memadai
- Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan dan keuangan pad OPD memadai baik kuantitas maupun kualitas
- Pelaporan keuangan OPD disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Solusinya :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau untuk menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang efisien, transparan dan bertanggungjawab.

Guna terciptanya sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kondisi baik didukung oleh program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9.095.411.000,- dengan realisasi Rp. 8.379.061.723 atau 92,12 %

3.3.5. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya semaksimal mungkin diantaranya adanya penghematan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, ditetapkan dalam perjanjian kinerja selama tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki anggaran APBD Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 6.278.450.000,- dengan realisasi Rp 5.871.882.846,- atau 93,52 % sedang belanja langsung sebesar Rp 9.095.411.000,- atau 92,12 %

3.3.6 Analisa Program / Kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten berau melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam 5 (Lima) Program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini program, kegiatan dan anggaran capaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau Tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.559.565.000	1.269.266.849	81,39
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	990.000	66,00
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	60.000.000	22.347.770	37,25
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	202.000.000	163.07.142	80,85
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.092.000	105.456.000	81,06
	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	130.000.000	123.413.800	94,93
	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.000.000	15.848.164	93,22
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	24.968.500	99,87
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	9.371.200	78,09
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.975.000	99,58
	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	279.885.000	259.993.000	92,89
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	4.125.000	51,56
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	223.988.000	92.743.150	41,41

	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000	345.263.023	98,65
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80.600.000	63.465.100	78,74
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	3.768.062.000	3.542.752.954	94,02
	Kegiatan Penyusunan standar satuan harga	439.560.000	437.378.800	99,50
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	154.000.000	150.403.510	97,66
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	140.000.000	134.601.500	96,14
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	140.000.000	139.046.500	99,32
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH. tentang penjabaran perubahan APBD	140.000.000	139.484.000	99,63
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	106.003.000	97.604.850	92,08
	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH. tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100.500.000	96.681.650	96,20
	Kegiatan Peningkatan penatausahaan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah	274.430.000	259.635.380	94,61
	Kegiatan Peningkatan pengelolaan gaji pegawai daerah	313.430.000	303.398.110	96,80
	Kegiatan Penyusunan analisa kebutuhan barang.	100.440.000	94.125.400	93,71
	Kegiatan Penatausahaanaset	523.542.000	480.328.000	91,75
	Kegiatan Pengamanan dan Pensertifikatan asset	282.050.000	212.248.748	75,25
	Kegiatan Penilaian aset daerah	325.201.000	320.777.982	98,64
	Kegiatan Pemindahtanganan dan penghapusan aset	323.906.000	318.163.700	98,23
	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan BMD	405.000.000	358.874.824	88,61
3.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	638.810.000	592.708.970	92,78
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	426.400.000	404.233.070	94,80
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	81.950.000	62.470.000	76,23
	Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis	125.460.000	123.005.900	98,04
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5.000.000	3.000.000	60,00
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.642.465.000	1.567.476.000	95,43
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.572.465.000	1.517.076.000	96,48
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	70.000.000	50.400.000	72,00
5.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.486.509.000	1.406.856.950	94,64
	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan tertib penatausahaan keuangan daerah	218.280.000	204.275.170	93,58
	Kegiatan Koordinasi rancangan perda APBD dan perbup tentang penjabaran APBD	60.000.000	58.595.000	97,66
	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.208.229.000	1.143.987.780	94,68

3.3.7. Realisasi Anggaran pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Realisasi anggaran secara keseluruhan program dan kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Berau pasda tahun anggaran 2018 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.095.411.000,- yang terbagi dalam 5 (Lima) Program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan. Dengan realisasi anggaran Rp 8.379.061.723 secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp 8.000.946.325,40 sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp 9.095.411.000 pencapaian realisasi fisik dan keaugan sebagaimana tersebut diatas dianggap Baik karena berada skala nilai $80 > 100$ katagore penilaian Bai dan Skala nila $55 > 80$ katagore penilaian sedang

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah kabupaten berau tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantora pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp 1.559.565.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.269.266.849,- persentase 81,39 % dimana pada dasarnya kegiatan yang ada disekretariat bersifat umum dan memfasilitasi bidang-bidang yang ada pada Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten berau dengan tujuan agar pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas, yang dapat dilihat lebih rinci.

Table 11.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Program Kegiatan	Target keuangan	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Realisasi %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.559.565.000	1.269.266.849	80,13	81,39
1	Penyediaan surat menyurat	1.500.000	990.000	1.140	1.133
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik/internet	60.000.000	22.347.770	12 bulan	12 bln
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	202.000.000	163.307.142	40 unit	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.092.000	105.456.000	12 orang	12 orang
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	130.000.000	123.413.800	12 bulan	12 bulan
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.000.000	15.848.164	12 bulan	12 bulan
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	24.968.500	20 Jenis	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	9.371.200	10 jenis	8 jenis
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.975.000	10 Jenis	10 Jenis
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	279.885.000	259.993.000	5 jenis	7 jenis
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8.000.000	4.125.000	1 jenis	1 jenis
12	Penyediaan makanan dan	223.988.000	92.743.150	12 bulan	12 bulan

	minuman				
13	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000	345.263.023	50 kali	
14	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80.600.000	63.465.100	30 kali	
15	Kegiatan jasa administrasi/teknis perkantoran	33.500.000	32.000.000	1 orang	1 orang

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam 15 (Lima Belas) kegiatan dengan anggaran keuangan sebesar Rp 3.768.062.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 3.542.752.954 dengan persentase 94,02 % dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan standar satuan harga pemerintah Kabupaten Berau dengan target sebanyak 5 dokumen atau 365 buku dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 360 buku kabupaten berau termasuk seluruh OPD, Bagian dan Kelurahan. Adapun untuk anggaran keuangan sebesar Rp 439.560.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 437.378.800,- dengan presentase sebesar 99,50 %

b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan realisasi fisik sebanyak 35 buku rancangan perda dan 55 buku perda yang mana buku rancangan perda sebanyak 31 buku diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Berau 2 buku kepada BPKAD Propinsi Kaltim untuk evaluasi APBD. Dan sisanya kepada Tim TAPD Pemerintah Kabupaten Berau, sedangkan untuk buku perda sebanyak 55 buku diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Berau sebanyak 31 buku, kepada Kementrian Keuangan 1 buku , kepada Kementrian Dalam Negeri 1 buku, kepada BPKAD Propinsi Kaltim 1 buku, Bupati, wakil Bupati, Inspektorat dan sisanya untuk arsip BPKAD. Kab.Berau. Adapun anggaran keuangan sebesar Rp 154.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 150.403.510,- dengan presentase 97,66 %.

c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran APBD dengan target fisiknya 35 buku rancangan perbup dan 55 buku peraturan Bupati dimana buku rancangan perbup sebanyak 31 bukudiperuntukan kepada anggota DPRD Kabupaten Berau,2 buku kepada BPKAD Propinsi Kaltim untuk evaluasi APBD dan sisanya kepada Tim TAPD. Sedangkan buku Perbup sebanyak 55 buku diperuntukan kepada anggota

DPRD Kabupaten Berau sebanyak 31 buku, kepada Kementerian Keuangan 1 buku, kepada Kementerian Dalam Negeri 1 buku kepada BPKAD Propinsi Kaltim 1 buku, termasuk kepada Bupati, wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektorat, dan sisanya untuk arsip BPKAD kabupaten berau, dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 140.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 134.601.500,- dengan presentase 96,14 %

d. Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk buku rancangan sebanyak 88 buku dan diperuntukan Sekretariat DPRD sebanyak 35 buku, BPKAD Propinsi Kaltim sebanyak 2 buku, Tim TAPD sebanyak 38 buku, Kementerian keuangan sebanyak 1 buku, Kementerian dalam negeri sebanyak 1 buku dan arsip sebanyak 10 buku. Adapun anggaran keuangan yang tersedia Rp 140.000.000,- dapat terealisasi Rp 139.046.500,- dengan presentase 99,50 %

e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD sebanyak 45 buku yang diperuntukan sebanyak 32 buku kepada anggota DPRD, sebanyak 2 buku kepada Kementerian keuangan, sebanyak 2 buku kepada BPKAD Propinsi Kaltim 1 buku untuk Gubernur Kaltim, 1 buku untuk kepala BPK dan sisanya 7 buku untuk arsip. Adapun anggaran keuangan yang tersedia sebesar Rp 106.003.000,- dengan realisasi sebesar Rp 97.604.850,- dengan presentase 92,08 %.

f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk buku Rancangan sebanyak 88 buku dan diperuntukan Sekretariat DPRD sebanyak 36 buku, BPKAD Propinsi sebanyak 2 buku, Tim TAPD sebanyak 38 buku, kementerian Keuangan sebanyak 1 buku, Kementerian dalam negeri sebanyak 1 buku dan arsip sebanyak 10 buku. Adapun anggaran keuangan yang tersedia Rp 140.000.000,- dengan realisasi Rp 139.484.000,- dengan presentase 99,63 %.

g. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan hasil sebanyak 68 buku yang diperuntukan sebanyak 64 buku kepada anggota DPRD Kabupaten Berau, sebanyak 1 buku kepada BPKAD Propinsi Kaltim, sebanyak 1 buku kepada Gubernur Kaltim, sebanyak 1 buku kepada BPK dan sisanya 1 buku untuk arsip. Adapun anggaran keuangan sebesar Rp 100.500.000,- dengan realisasi Rp 96.681.650,- dengan presentase 96,20 %.

h. Peningkatan Penatausahaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan laporan hari Kas Umum Daerah Kabupaten Berau yang diterbitkan setiap hari kerja

dengan hasil laporan posisi kas harian sebanyak 242 laporan dan laporan buk kas Penerimaan dan pengeluaran sebanyak 242 laporan. Laporan tersebut memberikan informasi tentang berapa besar dana yang masuk ke kas Umum Daerah Kabupaten Berau setiap hari dan berapa besar dana yang keluar dari kas umum daerah kabupaten Berau. Dari Laporan tersebut Kepala BPKAD selaku Bendahara Umu Daerah dapat melakukan manajemen Kas Umum Daerah. Untuk menjamin likuidasi Kas Umum Daerah agar Pemerintah Daerah dapat memenuhi kewajiban baik untuk memenuhi operasionakl semua SKPD maupun memenuhi kewajiban Pemerintah Daeerah kepada pihak ketiga. Informasi laporan harian kas juga dipergunakan untuk menentukan kebijakan penempatan uang yang ada di Kas Umum Daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah, disamping itu laporan harian Kas Umum Daerah juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau pada setiap tahun anggaran yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untk dilakukan pemeriksaan. Adapun dari anggaran keuangan sebesar Rp 274.430.000,- dapat terealisasi 259.635.380,- dengan presentase 94,61%

i. Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah baik dari sisi jumlah maupun dari sisi ketepatan waktu pembayaran gaji setiap bulan dengan hasil sebanyak 840 laporan dalam bentuk 48 buku yang terdiri dari Gaji Induk, Gaji Terusan, Kekurangan gaji, dan rapelan gaji. Dari kegiatan ini diperoleh output kegiatan berupa daftar gaji pegawai induk, daftar kekurangan gaji, daftar gaji terusan dan daftar kekurangan gaji pegawai negeri sipil daerah untuk 47 SKPD. Dengan jumlah opegawai negeri sipil daerah sekitar 5,300 orang,. Komponen terbesar dari kegiatan ini adalah pengadaan kertas gaji, pemeliharaan Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) disamping daftar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah juga dibuat laporan gaji setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui berapa jumlah pembayaran gaji masing – masing SKPD baik dari sisi jumlah dana maupun dari sisi jumlah pegawai pergolongan dan per eselon. Laporan tersebut dipergunakan untuk keperluan Pemeriksaan oleh Aparat fungsional dan juga disampingan ke PT Taspen Pesero dan BPJS kesehatan. Adapun anggaran keuangan sebesar Rp 313.430.000,- dapat terealisasi 303.398.110,- dengn presentase 96,80 %

j. Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan analisa kebutuhan barang.dengan target 1 dokumen tersedia untuk 10 buku adapun dari jumlah buku yang terealisasi sebanyak 10 buku yang mana diperuntukan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan BPKAD Propinsi Kaltim, Tim anggaran , DPRD Kab.Berau dan seluruh OPD dengan anggaran keuangan sebesar Rp 100.440.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 94.125.400,- dengan presentase 93,71

k. Penatausahaan Aset.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rekon asset tetap dan pesediaan kepada 47 OPD, kemudian melakukan inventaris barang milik daerah tahun 2018 hanya inventarisasi kendaraan dinas dan pembayaran biaya sewa Cloud pada tahun 2018 sebesar Rp.

197.100.000,- serta melakukan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun anggaran yang tersedia sebesar Rp 523.542.000,- dapat terealisasi Rp 480.328.000,- dengan presentase 91,75 %

l. Pengamanan dan Persertifikatan Aset.

Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan dan inventaris khusus tanah-tanah yang belum dimanfaatkan dan masih kosong di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Talisayan 2 porsil, Kecamatan Sambaliung 2 porsil, Kecamatan Teluk Bayur 1 porsil, Kecamatan Gunung Tabur 2 porsil, Kecamatan Segah 2 porsil, serta pemasangan plang tanah hibah dari masyarakat kurang lebih 12 ha untuk lokasi sirkuit di kampung samburakat dan pengamanan wisma atlit di tanjung redeb dengan mengganti kunci utama yang rusak ada 33 buah.

Kegiatan Persertifikatan dengan melakukan pengukuran, pemetaan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk balik nama sertifikat terminal Rinding serta Pengukuran dan Ploting tanah yang digunakan PLN di Sambaliung kurang lebih 11 ha. Adapun anggaran keuangan yang tersedia sebesar Rp 282.050.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 212.248.748,- dengan presentase 75,25 %

m. Penilaian Aset Daerah.

1. Membentuk Tim Penilai Aset daerah yang melibatkan Pihak-pihak terkait baik secara teknis maupun administrasi.
2. Melaksanakan Inventarisasi dan Rencana Penilaian atas objek yang akan dinilai terkait usulan Pemanfaatan dan pemindahtanganan serta penilaian Wajar untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Melaksanakan Penelitian Administrasi dan lapangan atas objek yang diusulkan untuk dilakukan penilaian.
4. Berkoordinasi dengan Penilaian (KPKNL Tarakan) mengenai usulan Penilaian dan Rencana Pelaksanaan
5. Melaksanakan Penilaian terhadap BMD yang tersebar di kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten.
6. Melaksanakan Sosialisasi atas Hasil Penilaian yang diterbitkan oleh Penilaian Pemerintah.
7. Membuat usulan SK. Hasil Penilaian atas Barang Milik Daerah
8. Mendokumentasikan Hasil Kegiatan.

n. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset

Kegiatan ini dilakukan

1. Menerima dan Menginventaris usulan pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan, tukar-menukar, hibah dan pernyataan modal
2. Menerima dan menginventarisir usulan pemusnahan barang milik daerah
3. Menerima dan menginventarisir penghapusan BMD dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
4. Membentuk Tim Penjualan BMD, Tim Penghapusan BMD dan Tim Hibah serta Tim penyerahan modal Pemerintah.
5. Melakukan penelitian administrasi dan lapangan dengan hasil Berita Acara penelitian administrasi dan lapangan atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMD
6. Mengajukan usulan persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan BMD kepada Bupati (Surat Penetapan Persetujuan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMD)
7. Kegiatan Pelelangan BMD bekerjasama dengan KPKNL Tarakan, dengan produk berupa risalah lelang dan penerimaan PAD yang bersumber dari penerimaan lain yang sah
8. Menerima dan Menginventaris permohonan pernyataan modal pemerintah
9. Menerbitkan Berita Acara penelitian penyerahan modal pemerintah.

10. Usulan Pesetujuan Pernyataan modal Pemerintah
11. SK.Persetujuan pernyataan modal pemerintah
12. Penerbitan SK Hibah BMD
13. Penerbitan SK Penjualan Rumah Dinas golongan 3 dan tanah milik pemerintah
14. Penerbitan SK Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah
15. Penerbitan SK Penjualan Peralaan dan Mesin Milik pemerintah
16. Penrbitan SK Penjualan barang Inventaris milik pemerintah
17. Berita Acara Pemusnahan BMD
18. Penerbitan SK Penghapusan BMD

Adapun anggaran yang tersedia Rp 323.906.000,- dengan realisasi 318.163.700 atau 98,23 %

o. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD.

Kegiatan ini dilaksanakan atas Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Timur dalam Pengelolaan Keuangan dan asset daerah, maka beberapa capaian yang telah dihasilkan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Mempercepat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada setiap tahun anggaran sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu
2. Efeseinsi dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.
3. Mempercepat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga dapat disampaikan tepat waktu untuk dilakukan pemriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Meningkatkan kualitas laporan dan dapat menyajikan data yang cepat, akurat dan efesein.
5. Pengendalian Transaksi melalui Kas Umum Daerah dapat terjamin.

Sedangkan secara Umum capaian yang dihasilkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Dapat menyediakan data base mengenai kondisi di daerah baik dari sisi keuangan maupun asset daerah dan mempermudah untuk menilai kinerja instansi pemerintah daerah

Dapat menyajikan informasi yang komprehensif, tepat, akurat dan mempercepat dalam pengambilan keputusan .

Basis Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah.

Table II.2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Program / Kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah	3.768.062.000	3.542.752.954	90,42	94,02
1	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	439.560.000	437.378.800	99,15	99,50

2	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD	154.000.000	150.403.510	81,66	97,66
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran APBD	140.000.000	134.601.500	96,14	96,14
4	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD	140.000.000	139.046.500	99,31	99,32
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran dan Perubahan APBD	140.000.000	139.484.000	99,43	99,63
6	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	106.003.000	97.604.850	92,08	92,08
7	Penyusunan rancangan Peraturan KDH. tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana an APBD	100.500.000	96.681.650	89,96	96,20
8	Peningkatan Penatausahaan penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah	274.430.000	259.635.380	92,73	94,61
9	Peningkatan Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah	313.430.000	303.398.110	82,14	96,80
10	Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang	100.440.000	94.125.400	93,71	93,71
11	Penatausahaan Aset	523.542.000	480.328.000	86,97	91,75
12	Pengamanan dan Pensertifikatan Aset	282.050.000	212.248.748	75,25	75,25
13	Penilaian Aset Daerah	325.201.000	320.777.982	93,30	98,64
14	Pemindahtanganan dan Penghapusan asset	323.906.000	318.163.700	96,78	98,23
15	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD	405.000.000	358.874.824	87,48	88,61

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemerintah Kabupaten Berau yaitu pengadaan roda empat sebanyak 3 unit yang terdiri dari Kendaraan roda empat 2.500 CC dan kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 3 unit diperuntukan untuk operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Ast Daerah Kabupaten Berau, dengan anggaran Rp 157.465.000- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.517.076.000,- dengan persentase 96,48 % yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

Tabel II.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Program/kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.572.465.000	1.517.076.000	96,48	96,48
2	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	70.000.000	50.400.000	72,00	72.00

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan terbagi dalam 4 (empat) Kegiatan dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 638.810.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 592.708.970,-,- dengan persentase 92,78 % yang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 50 Buku yang diperuntukan kepada DPRD Kab. Berau sebanyak 32 Buku, kepada Kementerian Keuangan sebanyak 1 Buku, kepada BPKAD Provinsi Kaltim sebanyak 1 Buku, kepada BPK untuk keperluan Audit sebanyak 1 Buku, kepada Bidang Aset dan Anggaran sebanyak 2 Buku dan Arsip sebanyak 8 Buku. Adapun untuk realisasi keuangan sesuai dengan anggaran keuangan sebesar Rp 426.400.000,- dapat terealisasi Rp 404.233.070,- dengan presentase atau 94,80
- b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD sebanyak 3 Buku yang terdiri dari Laporan Keuangan Bulanan,

Laporan Keuangan Semesteran (Prognosis) dan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan berdasarkan anggaran keuangan sebesar Rp 81.950.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 62.470.000,- dengan persentase sebesar 76,23 %

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis sebanyak 122 Buku yang terdiri 70 Buku Laporan Bulanan, 50 Buku Laporan Semesteran, 36 Buku disampaikan kepada DPRD Kabupaten Berau, 1 Buku disampaikan ke Menterian Keuangan dan sisanya sebagai laporan. Adapun Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis. Dengan Anggaran keuangan sebesar Rp 125.460.000,- dapat terealisasiRp 123.005.900,- dengan persentase sebesar 98,04 %.

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD sebanyak 5 Dokumen yang terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebanyak 7 Buku dan Perjanjian Kinerja Eselon II sampai Eselon IV sebanyak 5 Buku diperuntukkan kepada Inspektorat Kabupaten Berau sebanyak 1 Buku dan yang lain untuk arsip, Renstra BPKAD sebanyak 5 Buku diperuntukkan kepada Baplitbang Kabupaten Berau sebanyak 1 Buku, RKA, DPA/DPPA sebanyak 21 Buku diperuntukkan kepada Bidang Anggaran DPA/DPPA sebanyak 3 Buku dan RKA sebanyak 1 Buku. Adapun dengan anggaran keuangan sebesar Rp 5.000.000,- dapat terealisasi Rp 3.000.000,- dengan persentase 60,00 %, sehingga pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel II.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

Tabel II.4
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Program/kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	426.400.000	404.233.070	94,80	94,80
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	81.950.000	62.470.000	76,23	76,23
3	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis	125.460.000	123.005.900	98,04	98,04
4	Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5.000.000	3.000.000	60,00	60,00

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota terbagi dalam 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 1.486.509.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.406.856.950,- dengan persentase 94,64 % yang dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah

Salah satu tugas dan fungsi BPKAD selaku Pejabat Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah memberikan arahan dan pembinaan kepada semua SKPD baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah, dan untuk dapat mendukung kegiatan tersebut dari sisi penatausahaan keuangan maka dibuat suatu kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Tertib Penatausahaan keuangan daerah kepada 47 SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Berau, kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan daerah dilakukan dengan cara :

- a. Mengundang semua Pejabat dan Pengelolaan Keuangan dimasing masing SKPD
- b. Mengunjungi SKPD
- c. Menerima konsultasi dari masing masing SKPD

Dari Kegiatan pembinaan tersebut diperoleh hasil semakin meningkatnya pemahaman keuangan di kabupaten berau dengan indikator bahwa dokumen pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang disampaikan oleh masing masing SKPD ke BPKAD Kab. Berau semakin baik, walaupun diakui terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan seperti sering dilakukan pergantian baik pejabat dan pengelola keuangan dari masing masing SKPD, sehingga pembinaan harus mulai dari awal.

Adapun dari anggaran keuangan sebesar Rp 218.280.000,- dapat terealisasi Rp 204.275.170,- dengan persentase 93,58 %, dapat terealisasi keuangan maupun realisasi fisik sebesar 81,06 % merupakan realisasi maksimal sedangkan sisa dana merupakan efisiensi belanja.

2. Kegiatan Koordinasi rancangan perda APBD dan perbup tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan Evaluasi rancangan perda APBD dan perbup tentang Penjabaran APBD ke Pemerintah Propinsi Kaltim di Samarinda sebanyak 2 (dua) Kali yang terdiri dari Evaluasi APBD Perubahan dan Evaluasi APBD Murni.

Adapun dari anggaran keuangan sebesar Rp. 60.000.000,- dapat terealisasi Rp. 58.595.000,- dengan persentase 93,58 %.

3. Kegiatan Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk mengadakan fasilitasi pelaksanaan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Rapat Bantuan keuangan ke Pemerintah Propinsi Kaltim
- 2) Rapat pembahasan pendapatan dan BTL Tahun 2018
- 3) Rapat Bantuan keuangan APBD Tahun 2018
- 4) Rapat Bantuan keuangan P APBD Tahun 2018
- 5) Rapat pembahasan tentang PTT dan Tenaga kontrak
- 6) Rapat pembahasan rancangan KUA PPAS APBD.
- 7) Rapat pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD.
- 8) Rapat pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD
- 9) Rapat pembahasan KUA Perubahan APBD
- 10) Rapat pembahasan Raperda APBD 2019

Adapun Anggaran Keuangan sebesar Rp 1208.229.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.143.986.780,- dengan prosentase 94,68 % sehingga pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ Kota secara lebih rinci dapat dilihat pada

table II.5

Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi keuangan
	Program Pembinaa	1.486.509.000	1.406.856.950	92,47	94,64

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota				
1	Pembinaan dan Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	218.280.000	204.275.170	81,06	93,58
2	Koordinasi rancangan perda APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD	60.000.000	58.595.000	92,98	97,66
3	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.208.229.000	1.143.986.780	94,51	94,68

Pencapaian Indikator Kinerja Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam pemnyusunan	WTP
2	Presentase asset yang terlayani	Peringkat	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
3	Penyusunan Perda dan Perbup	Perda/Perbup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Nilai laporan Akuntabilitas Kinerja	Peringkat	B	BB	77,02	B	-	-

Pada Tahun Anggaran 2018 Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau yang dianggarkan untuk mencapai sasaran strategi sebesar Rp 9.095.411.000,- dan realisasi anggaran Rp 8.379.061.723,--

dengan capaian presentase 92,12 maka serapan anggaran BPKAD tahun 2018 dianggap baik.

Tujuan dan Sasaran strategi telah didukung oleh pertanggungjawaban keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPKAD Kabupaten Berau tahun 2018 dapat dilihat dengan realisasi anggaran perkegiatan dengan rincian masing-masing table diatas.

B A B I V P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015. Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran. Untuk disampaikan kepada Bupati Berau sebagai pemangku kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten berau berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu penyusunan Lakip juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sebagai penutup untuk LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Berau telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian bahwa selama tahun 2015 ini disadari banyak ditemui hambatan/permasalahan yang masih harus dibenahi di masa masa yang akan datang antara lain :

1. Optimalisasi sumber daya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing
2. Penyesunan system pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
3. Meningkatkan SDM Pegawai dengan kursus-kursus diklat, meningkatkan kerjasam dengan pihak ke 3
4. Menyusun jadwal penyerapan program / kegiatan sehingga tercapai target yang diinginkan tepat waktu.
5. Konsultasi intensif dengan Pemerintah Pusat (Kementrian dalam negeri dan Kementrian Keuangan) dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan instropeksi maupun kritik yang konstuktif dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik.

KEPALA BPKAD

DRS.H.SYAMSUL ABIDIN,MM

NIP. 19620804 198603 1 004

